



## **ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI DI 5 PROVINSI TERMISKIN DI INDONESIA**

**Apip**

Program Studi Akutansi Perpajakan Departemen Bisnis Keuangan Sekolah Vokasi  
Universitas Diponegoro

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap perkembangan ekonomi 5 provinsi termiskin di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 5 provinsi termiskin di Indonesia yaitu: Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Gorontalo selama kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2020 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis data menggunakan regresi data panel dengan metode Common Effect Model (CEM) dan Fix Effect Model (FEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di 5 provinsi termiskin di Indonesia. Presentase pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi masih sangat kecil, dan variabel pertumbuhan ekonomi masih banyak dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini. Selain itu desentralisasi fiskal juga tidak memberikan pengaruh dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat 5 Provinsi termiskin di Indonesia.*

### **Kata Kunci :**

*Desentralisasi Fiskal, Kesejahteraan Masyarakat, Pertumbuhan Ekonomi*

### **Abstrack**

*This study aims to analyze the effect of fiscal decentralization on the economic development of the 5 poorest provinces in Indonesia. The population in this study consisted of the 5 poorest provinces in Indonesia, namely: Papua, West Papua, East Nusa Tenggara, Maluku, and Gorontalo during the period 2006 to 2020 sourced from the Central Statistics Agency (BPS). Data analysis used panel data regression with the Common Effect Model (CEM) and Fix Effect Model (FEM) methods. The results of this study indicate that fiscal decentralization has no significant effect on the level of economic growth in the 5 poorest provinces in Indonesia. The percentage of the influence of fiscal decentralization on economic growth is very small, and the variable of economic growth is still influenced by other variables outside of this study. In addition, fiscal decentralization has no effect and is not significant for the welfare of the people of the 5 poorest provinces in Indonesia.*

### **Keywords:**

*Community Welfare; Economic Growth; Fiscal Decentralization*

## **PENDAHULUAN**

Selama bertahun-tahun pemerintah Indonesia berusaha menciptakan pemerataan di bidang ekonomi guna mengurangi tingkat ketimpangan ekonomi antar daerah yang masih tinggi. Salah satu program guna mengurangi tingkat ketimpangan ekonomi adalah dengan kebijakan desentralisasi fiskal. Kebijakan Desentralisasi Fiskal muncul setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor

22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999. Desentralisasi Fiskal telah membawa perubahan yang mendasar dalam pengaturan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah berubah dari sistem

pemerintahan yang sentralistik, menjadi bersifat desentralistik (Priyarsono, 2010: 21).

Menurut Priyarsono et al (2010: 22) dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah mendapatkan keleluasaan yang lebih besar dalam mengelola keuangan Daerah yang dituangkan dalam anggaran belanja, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Pelaksanaan desentralisasi fiskal menganut prinsip *money follows function*, yang berarti setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Kewenangan daerah yang semakin luas diharapkan dapat meningkatkan kemandirian fiskal Daerah serta kinerja Pemerintah untuk mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang lebih baik, yang ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan desentralisasi fiskal menghadirkan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Bagi daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya yang dapat diandalkan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kebijakan ini disambut baik, mengingat hakekat otonomi yang merupakan adanya kewenangan daerah, bukan pendelegasian (Saragih, 2003; 34). Daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi pemerintah pusat, tetapi benar-benar mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan kreatifitas dalam mengembangkan potensi yang selama era desentralisasi bisa dikatakan terpasung (Mardiasmo, 2002; 57).

Transfer dana antar pemerintahan merupakan hal yang wajar dan umum terjadi di semua negara di dunia.. Transfer tersebut diberikan dengan tujuan untuk menginternalisasikan eksternalitas fiskal yang muncul lintas daerah karena tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal *fiscal capacity* yang dimiliki antar daerah sehingga menimbulkan *fiscal gap*, memperbaiki sistem perpajakan, mengoreksi ketidakseimbangan fiskal dan mengakomodasi pemerataan fiskal antar daerah. Di Indonesia transfer dari pemerintah pusat ke daerah meliputi : dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Besarnya transfer

pemerintah pusat ke setiap Provinsi di Indonesia, seluruhnya selalu mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut juga terjadi pada pengeluaran total seluruh Provinsi di Indonesia. Peningkatan transfer yang diikuti oleh peningkatan pengeluaran total, menunjukkan bahwa total pengeluaran pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh besarnya transfer dari pemerintah pusat. Dampak pengeluaran pemerintah terhadap kondisi makro dan sosial Provinsi di Indonesia dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu pertumbuhan ekonomi, kesenjangan ekonomi antar daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal telah dilaksanakan sejak tahun 2000 dan otonomi daerah yang pelaksanaannya sudah 21 tahun, seharusnya menghasilkan kinerja keuangan daerah yang diukur dari kemandirian daerah semakin baik serta kinerja pembangunan daerah yang diukur dari pertumbuhan ekonomi, kesenjangan ekonomi antar daerah, dan kesejahteraan masyarakat yang seharusnya semakin baik. Meskipun dari variabel makro ekonomi yang dicapai menyebabkan pertumbuhan ekonomi tiap Provinsi relatif meningkat namun, di sisi lain ketimpangan antar Provinsi masih tetap terjadi di Indonesia . Tiap daerah mengalami peningkatan PAD yang berbeda-beda yang mana terjadi perbedaan peningkatan pendapatan antar wilayah seluruh Provinsi di Indonesia, sehingga menyebabkan kesenjangan ekonomi antar wilayah. Menurut Data BPS tahun 2020 terdapat 5 provinsi termiskin di Indonesia meskipun telah menerima dana desentralisasi fiskal yang cukup besar, 5 Provinsi tersebut adalah Papua (26.8%), Papua Barat (21.7%), Nusa Tenggara Timur (21.21%), Maluku (17,99%), Gorontalo (15.59%). Melalui otonomi dan desentralisasi fiskal, diharapkan seluruh provinsi di Indonesia dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 5 Provinsi Termiskin di Indonesia tahun 2006-2020?

2. Apakah desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di 5 Provinsi Termiskin di Indonesia tahun 2006 – 2020?

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Desentralisasi Fiskal

Machfud Siddik (2002), desentralisasi merupakan sebuah instrumen untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Dengan desentralisasi, akan diwujudkan dalam pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (taxing power), terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat. Tujuan penerapan adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, dimana pemerintah dapat bekerja dengan lebih baik (efisien) dalam kondisi tersebut

Desentralisasi Fiskal adalah penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Desentralisasi merupakan pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi.

Pada sistem pemerintahan yang desentralisasi diwujudkan dengan sistem otonomi daerah yang memberikan sebagian wewenang yang tadinya harus diputuskan pada pemerintah pusat kini dapat diputuskan di tingkat pemerintahan daerah. Kelebihan sistem ini adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. Namun kekurangan dari sistem desentralisasi pada otonomi khusus untuk daerah adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal

tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat.

### Konsep Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi merupakan bagian penting dalam melakukan analisa perkembangan ekonomi di suatu wilayah. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu unsur utama dalam suatu pembangunan ekonomi dan mempunyai implikasi kebijakan yang cukup luas, baik terhadap wilayahnya maupun terhadap wilayah lain.

Schumpeter mengemukakan bahwa Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan “teknologi” produksi itu sendiri.

Menurut Arsyad (2010: 269) ada empat faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat (negara) yaitu:

1. Akumulasi modal, termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fisik (mesin-mesin), dan sumberdaya manusia (human resources).
2. Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah tenaga kerja dan akan meningkatkan potensi pasar domestik.
3. Kemajuan teknologi, berupa cara baru atau perbaikan cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan.
4. Sumberdaya institusi (sistem kelembagaan), institusi yang baik dan kuat akan lebih mampu mengalokasikan sumberdaya secara lebih efisien serta akan melahirkan kebijakan ekonomi yang tepat dan kredibel.

Beberapa studi di berbagai negara masih mempelajari dalam mengimplementasikan desentralisasi fiskal mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, harus diakui juga bahwa dasar teoritis yang menjelaskan kedua hubungan tersebut saat ini sedang dikembangkan dan banyak menjadi perdebatan di antara para ahli dalam berbagai literatur teoritik dan empirik.

Menurut penelitian Oates (1993) desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah/pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang - barang publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan lebih didengarkan untuk menganekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisiensi alokasi. Oates juga menyatakan bahwa desentralisasi fiskal meningkatkan efisiensi ekonomi yang kemudian berkaitan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi. Perbelanjaan infrastruktur dan sektor sosial oleh pemerintah daerah lebih memacu pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya daerah memiliki kelebihan dalam membuat anggaran pembelanjaan sehingga lebih efisien dengan memuaskan kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaannya.

Akan tetapi, terkadang desentralisasi fiskal justru tidak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi hal itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh World Bank (1997b) dalam argumentasi kedua dan ketiga. Argumentasi kedua, bahwa desentralisasi akan menyebabkan instabilitas makroekonomi, sehingga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian terdapat hubungan negatif antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Dan argumentasi ketiga, mengatakan bahwa dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi akan berbeda dengan negara maju dan berkembang. Bagi negara berkembang keuntungan-keuntungan dari desentralisasi ini tidak begitu dirasakan. Pendapat ini didasari karena kelembagaan di negara berkembang tidak memberikan intensif kepada pemerintah daerah untuk menggunakan informasi berkaitan dengan konstituennya. Pemimpin mungkin ditunjuk berdasarkan kekuasaannya. Alasan lain adalah bahwa pemerintah daerah di negara berkembang mungkin tidak memiliki sumber daya ekonomi yang cukup dan lemahnya skill sumber daya manusia dalam mengelola anggaran.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi 5 Provinsi termiskin di Indonesia.

### **Konsep Desentralisasi Fiskal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Tujuan akhir dari kebijakan dan kegiatan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi, yang berarti implementasi kebijakan dan perluasan kegiatan ekonomi adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru. Ekonomi kesejahteraan menurut Pigou (1960) dalam Sasana (2008: 83) adalah bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun secara tidak langsung dengan pengukuran uang. Sedangkan pengertian kesejahteraan sosial menurut Whitnaker dan Fredrico (1997: 361) merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut.

Penelitian yang menjelaskan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat diantaranya Hirawan (2007) menyatakan bahwa Indonesia mengalami perbaikan cukup signifikan dalam berbagai aspek di era otonomi daerah. Di bidang pendidikan, misalnya, dorongan pemerintah pusat untuk membangun sekolah - sekolah di setiap daerah telah meningkatkan tingkat pendaftaran (enrollment rate) cukup tinggi. Berbagai indikator di bidang kesehatan masyarakat juga menunjukkan adanya perbaikan/peningkatan selama beberapa tahun terakhir; belanja publik secara riil untuk kesehatan dari tahun 2001-2006 naik hampir 100%

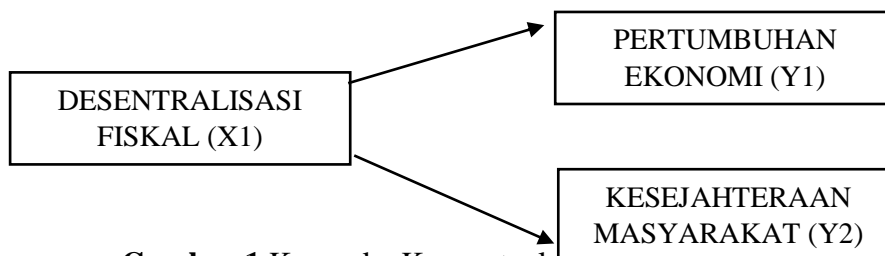
Berdasarkan penjelasan tersebut maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2 : Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat 5 Provinsi termiskin di Indonesia.

### **Kerangka Konseptual**

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun suatu

kerangka pikir mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di 5 provinsi termiskin di Indonesia



**Gambar 1** Kerangka Konseptual

**METODE PENELITIAN**

**Rancangan Penelitian yang Digunakan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode kuantitatif dan pendekatan deskriptif.

**Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), melalui metode dokumenter. Data tersebut diseleksi dan disesuaikan dengan metode yang akan digunakan, metode yang digunakan adalah metode panel dan Persamaan Simultan.

**Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumenter yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), berbagai artikel, jurnal ilmiah dan hasil penelitian untuk dijadikan referensi. Data yang sudah ada disesuaikan selanjutnya diolah dan dianalisis baik secara kuantitatif dan kualitatif.

**Populasi, Sampel, dan Data Penelitian**

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Provinsi di Indonesia. Sampelnya adalah 5 Provinsi termiskin yang ada di Indonesia yaitu Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Gorontalo. Pemilihan sampel tersebut didasari untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap perkembangan ekonomi di 5 Provinsi termiskin di Indonesia.

Data penelitian ini merupakan data sekunder dengan menggunakan bentuk pooled data pada periode pengamatan tahun 2006 sampai dengan tahun 2020, yaitu:

- a. Data realisasi penerimaan dana desentralisasi fiskal provinsi;
- b. Data pertumbuhan ekonomi provinsi; dan
- c. Data kesejahteraan masyarakat yang menggunakan proksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi.

**Definisi Operasional Variabel**

1. Desentralisasi fiskal (X1)  
Desentralisasi fiskal diproksi dengan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan realisasi pengeluaran total pemerintah kabupaten/kota. Dalam melihat kinerja keuangan daerah dapat menggunakan derajat kemandirian daerah untuk mengukur seberapa jauh penerimaan berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah (Halim & Damayanti, 2007: 262).
2. Pertumbuhan ekonomi (Y1)  
Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
3. Kesejahteraan Masyarakat (Y2)  
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan proksi dari kesejahteraan dengan menghitung indeks gabungan dari tiga indikator: longevity sebagai ukuran harapan hidup pengetahuan

(knowledge decent ), dan standar hidup layak ( standard of living).

**Teknis Analisis**

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan data panel, yang dikembangkan untuk mempelajari pengaruh langsung maupun tidak langsung antara variabel independent dan dependent. (1) Model pertama menggambarkan pengaruh derajat desentralisasi fiskal yang terhadap indikator perekonomian daerah berupa Pertumbuhan Ekonomi; ; (2) Model kedua menggambarkan pengaruh derajat desentralisasi fiskal yang terhadap indikator perekonomian daerah berupa kesejahteraan masyarakat. Adapun persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut :

1. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

$$PE_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 DF_{i,t} + \dots + \mu_{it}$$

..... (1)

2. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap terhadap Kesejahteraan Masyarakat

$$KM_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 DF_{i,t} + \dots + \mu_{it}$$

..... (2)

Keterangan :

DF : Derajat Desentralisasi Fiskal sampel 5 Provinsi tahun t

LPE : Pertumbuhan Ekonomi sampel 5 Provinsi tahun t

KM : Kesejahteraan Masyarakat sampel 5 Provinsi tahun t

$\alpha_0, \beta_0$ : Koefisien Konstanta

$\alpha_1, \beta_1$ : Koefisien Parameter

$\mu_{it}$ : Faktor Pengganggu Lainnya

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Tabel 1** Hasil Estimasi Regresi Data Panel dengan Metode OLS Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dependent Variable: PERTUMBUHAN  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 03/25/21 Time: 21:33  
 Sample: 2006 2020  
 Periods included: 15  
 Cross-sections included: 5  
 Total panel (balanced) observations: 75

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DESENTRALISASI	-1.09E-12	5.33E-13	-2.048264	0.0441
C	7.192931	1.231576	5.840429	0.0000
Root MSE	6.253463	R-squared		0.054348
Mean dependent var	5.164133	Adjusted R-squared		0.041393
S.D. dependent var	6.473954	S.E. of regression		6.338549
Akaike info criterion	6.557481	Sum squared resid		2932.935
Schwarz criterion	6.619281	Log likelihood		-243.9056
Hannan-Quinn criter.	6.582157	F-statistic		4.195385
Durbin-Watson stat	1.366899	Prob(F-statistic)		0.044131

**Tabel 2** Hasil Estimasi Regresi Data Panel dengan Metode FEM Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Dependent Variable: IPM  
Method: Panel Least Squares  
Date: 03/28/21 Time: 21:01  
Sample: 2006 2020  
Periods included: 15  
Cross-sections included: 5  
Total panel (balanced) observations: 75

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DESEN	-2.42E-15	2.57E-13	-0.009393	0.9925
C	64.16449	0.569076	112.7521	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
Root MSE	2.566651	R-squared	0.583250
Mean dependent var	64.16000	Adjusted R-squared	0.553051
S.D. dependent var	4.002616	S.E. of regression	2.675919
Akaike info criterion	4.883081	Sum squared resid	494.0773
Schwarz criterion	5.068480	Log likelihood	-177.1155
Hannan-Quinn criter.	4.957109	F-statistic	19.31340
Durbin-Watson stat	0.767648	Prob(F-statistic)	0.000000

### Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa besar kemampuan Variabel independen dalam menjelaskan Variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Semakin besar nilai  $R^2$  maka Variabel-Variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi Variabel dependen. Berdasarkan hasil estimasi didapat nilai koefisien determinasi atau  $R^2$  adalah sebesar 0,054348. Hal ini berarti perubahan yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi saat ini sebesar 5.43 persen dapat dijelaskan (disebabkan) oleh desentralisasi fiskal dan sisanya 94.57 persen dapat dijelaskan oleh faktor-faktor selain itu.

Uji kriteria statistik menunjukkan bahwa secara parsial desentralisasi fiskal berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0,0441 lebih kecil dari  $\alpha$  0,05 dengan asumsi kenaikan 1 persen desentralisasi fiskal akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar -1,0900 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tidak sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di 5 Provinsi termiskin di Indonesia. Beberapa hal yang menyebabkan kurang maksimalnya

pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap 5 Provinsi di Indonesia adalah kurang terarahnya rencana penganggaran untuk pembangunan daerah, dana desentralisasi fiskal ini hanya dimanfaatkan untuk sekedar membayar pegawai daerah. Selain itu, ketidakseimbangan desentralisasi fiskal antardaerah disebabkan kurang berperannya BUMD dalam menopang pendapatan daerah sehingga daerah hanya menunggu kucuran dana dari pemerintah pusat.

Hal ini sesuai dengan penelitian Abdillah (2010) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten / kota di Jawa Timur karena besarnya belanja tidak langsung. Selain itu menurut Iriani (2015) desentralisasi fiskal berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena kurang memadainya perencanaan anggaran dan rendahnya kemampuan untuk memanfaatkan anggaran dalam hal ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah

### Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa besar kemampuan Variabel independen dalam menjelaskan Variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Semakin besar nilai  $R^2$  maka Variabel-Variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan

untuk memprediksi variasi Variabel dependen. Berdasarkan hasil estimasi didapat nilai koefisien determinasi atau R squared ( $R^2$ ) adalah sebesar 0,583250. Hal ini berarti perubahan yang terjadi pada kesejahteraan masyarakat saat ini sebesar 58,32 persen dapat dijelaskan (disebabkan) oleh desentralisasi fiskal dan sisanya 51,68 persen dapat dijelaskan oleh faktor-faktor selain itu.

Pengujian hipotesis dilihat dari nilai t-statistik yang diperoleh untuk desentralisasi fiskal yaitu bernilai -0.009393, pada nilai t-statistik dari desentralisasi fiskal menunjukkan hasil yang tidak signifikan dalam mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari nilai t-statistik desentralisasi fiskal lebih besar daripada nilai t-tabel ( $-0.009393 < 1.99254$ ). Hasil ini membuktikan bahwa hipotesis pada penelitian ini terdapat pengaruh positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat di 5 Provinsi Termiskin di Indonesia ditolak.

Uji kriteria statistik menunjukkan bahwa secara parsial desentralisasi fiskal berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0.9925 lebih besar dari alpha 0,05, dengan asumsi kenaikan 1 persen derajat desentralisasi fiskal akan menurunkan kesejahteraan masyarakat sebesar -2.4200 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh negatif dan tidak signifikan antara desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat di 5 Provinsi Termiskin di Indonesia. Hal ini dikarenakan alokasi dana desentralisasi fiskal belum dimanfaatkan secara maksimal, untuk keperluan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan, maka dapat menjawab dan disimpulkan dari beberapa masalah dalam penelitian ini mengenai dampak desentralisasi fiskal terhadap perkembangan ekonomi 5 Provinsi Termiskin di Indonesia yaitu Desentralisasi fiskal berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini bahwa adanya

pengaruh positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah 5 Provinsi termiskin di Indonesia. Desentralisasi fiskal berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini bahwa adanya pengaruh negatif dan tidak signifikan antara desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat 5 Provinsi termiskin di Indonesia

## Saran

Saran dalam penelitian ini mengenai pengelolaan dana desentralisasi fiskal berupa peningkatan kemampuan pengelolaan fiskal daerah melalui peningkatan kemampuan pegawai dan membuat rencana pembangunan prioritas dari kucuran dana desentralisasi fiskal. Memunculkan kutub-kutub pertumbuhan ekonomi baru dengan menekankan yang pada gilirannya dapat memperkecil kesenjangan ekonomi antar daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah tidak hanya mengejar laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi diharapkan lebih intensif melakukan pembangunan dengan berbasis manusia (human development) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, K. (2010). Dan Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah Serta Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Timur, (3), 187–197.
- Arsyad, Lincolin. 2010. Ekonomi Pembangunan. Edisi 5. UPP STIM YKPN
- Badan Pusat Statistik. 2018. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
- Badan Pusat Statistik. 2009. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

- Badan Pusat Statistik. 2020. Indeks Pembangunan Manusia 2019. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
- D. S. Priyarsono; Budi Asih; Neli Agustina. 2010. Desentralisasi Fiskal, Tax Efiort dan Pertumbuhan Ekonomiz Studi Empirik Kabupaten/Kota di Indonesia 2001-2008. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*. Vol 11 No 1 (2010) : 21 – 34
- Halim, A dan Damayanti, T. 2007. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jogjakarta: UPP AMP YKPN
- Iriani, D. (2015). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat DI Provinsi Papua Tahun 1997-2013, (1993), 185–199. Retrieved from <http://eprints.upnyk.ac.id/871/>
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI. hal. 57 Yogyakarta
- Oates, W. E. (1993). Fiscal decentralization and economic development. *National Tax Journal*, 46(3), hal. 237-243.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sasana, Hadi. 2006 *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Antar Daerah Serta Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Di Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah*, Disertasi, tidak dipublikasikan. Surabaya: Pascasarjana Unair.
- Siddik, Machfud. 2002. *Kebijakan, Implementasi, dan Pandangan ke Depan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*, diakses 17-01-2012
- World Bank. (1997b). *On line source book on decentralization and rular development*. Decentralization Thematic Team, SDA.